



Seminar 120 TAHUN MAJLIS RAJA-RAJA MELAYU

19 September 2017, 8.00 pagi - 4.30 petang
Bilik Senat, Aras 5, Canselor, UKM

Penganjur: Persatuan Sejarah Malaysia & Universiti Kebangsaan Malaysia
Dengan Kerjasama: Pejabat Penyimpan Mutor Besar Raja-raja Malaysia

KERAJAAN BANGGAI DAN PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF SEJARAH MARITIM¹

Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M. Hum., Haliadi, SS., M. Hum., PhD & Dr. Didik Pradjoko, M. Hum.
Universitas Indonesia

ABSTRAK

Makalah ini membahas mengenai dinamika kerajaan Banggai dan isu pemekaran wilayah di bekas daerah kekuasaannya di Sulawesi Tengah dengan pendekatan sejarah maritim. Dengan menunjuk pada jalur pelayaran tradisional di Laut Maluku, sebagaimana diungkapkan dalam *Nagarakartagama* (1365), Banggai sebagai salah satu pusat pelabuhan telah memainkan peran penting dalam interkoneksi pelabuhan terutama di bagian timur Sulawesi. Pembagian wilayah sebagai akibat dari pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di kabupaten Banggai sejak Reformasi 1998, menjadi tiga kabupaten, justru memperlihatkan kemunculan kembali karakteristik bahari pada bekas wilayah kekuasaan kerajaan Banggai. Kabupaten Banggai sebagai induk (1960) yang berpusat ibukota di Luwuk meskipun berada di "daratan" Sulawesi, mempunyai pelabuhan yang menjangkau lingkup lokal, regional, dan internasional. Kabupaten Banggai Kepulauan yang terbentuk pada 2004 mempunyai pelabuhan Salakan, sekaligus sebagai ibukota. Sedangkan Kabupaten Banggai Laut dibentuk pada 2013, di sinilah terletak pusat kerajaan Banggai. Setidaknya sejak abad ke-14 dari Banggai inilah berlangsung pelayaran melalui jalur-jalur ke utara ke Gorontalo, ke Ternate dan ke selatan ke Buton, Kepulauan Sula. Dengan menggunakan kerangka kerja (*frame-work*) pembentukan negara-bangsa (*nation-state formation*), jaringan maritim ini hendak dimaknai sebagai infrastruktur berwujudnya Indonesia. Diaspora sukubangsa seperti Bugis-Makassar, Buton, Mandar, Bajau, dan orang-orang lain dari bagian timur nusantara telah membentuk keragaman masyarakat Banggai. Nilai tradisi kerajaan Banggai yang masih eksis dapat dimaknai sebagai kohesi masyarakat dan budaya Banggai. Pemekaran wilayah dengan terbaginya Banggai menjadi tiga kabupaten pada hakikatnya tidak melemahkan jaringan maritim.

Kata kunci: Banggai; Kerajaan; Daerah Otonomi Baru; Maritim

PENGENALAN

Sejarah selalu sezaman (*history is always contemporary*) begitu dikemukakan Benedetto Croce. Kata "kontemporer" berarti sezaman dengan sejarawan yang melakukan studi sejarah mengenai masa kini atau masa mutakhir. Lalu bagaimana sejarah sebagai kejadian atau peristiwa masa lampau boleh disebut berkenaan (juga) dengan masa kini atau masa kontemporer. Pengertian kontemporer dalam sejarah yang dimaksud Croce adalah bahwa masa lampau tetap relevan dengan masa sekarang. Sejarah dalam pengertian ini adalah masa lampau yang gaungnya masih dirasakan hingga kini. Boleh juga bahwa karena ada keinginan manusia untuk menafsirkan masa lampau. Jadi jelas di sini bahwa dari perspektif kekinian, masa lampau hendak dimaknai. Dalam talian menurut pendapat R.G. Collingwood, sejarawan lah yang mempunyai peran untuk "menghadirkan masa lampau" (*to re-enactment of the past*). Seturut pandangan

¹Makalah ini merupakan bagian dari laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) yang dibiayai oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2017, berjudul "Budaya Bahari dan Integrasi Bangsa: Menggali Nilai-Nilai Kecemerlangan Lokal Masyarakat di Kawasan Indonesia Timur Untuk Memperkuat Negara Maritim".

ini maka boleh diterima pendapat bahwa "sejarah berulang", meskipun tentu saja bukan pada peristiwanya tetapi pada nilai-nilai atau spiritnya.

Suatu gejala seiring pelaksanaan otonomi daerah sejak reformasi 1998 di Indonesia, adalah terjadinya pemekaran² wilayah yang ditandai dengan terbentuknya daerah otonomi baru (DOB). Pembentukan DOB berimplikasi pada pengisian sejumlah jabatan apakah pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Penambahan provinsi sejak reformasi berjumlah delapan --Banten, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, dan Kalimantan Utara--, sehingga kini terdapat 34 provinsi di Indonesia. Penambahan DOB kabupaten/kota jauh lebih besar lagi dan sudah pada bilangan ratusan banyaknya. Ada indikasi menarik untuk teliti bahwa terjadi persaingan elite politik daerah dalam memperebutkan jabatan gubernur dan bupati/walikota, diikuti oleh orang yang secara langsung tidak langsung "memanfaatkan" asal usul keturunan dari raja atau sultan yang "pernah" ada di daerahnya. Pusat kerajaan atau keraton/kedaton tidak jarang digunakan sebagai posisi tawar bagi penentuan ibukota kabupaten. Jika demikian pembentukan DOB berimplikasi pada penentuan batas-batas wilayah administrasi yang tidak memperhatikan atau mempertimbangkan aspek tradisional, yang ternyata masih "bermakna" atau "dimaknai" untuk kepentingan tertentu.

Eksplorasi makna kesezamanan sejarah (*historical contemporaneity*) sejak 1999 hingga masa kontemporer di Indonesia berkaitan dengan pemekaran wilayah menjadi menarik dan penting dikaji karena tampak adanya relevansi masa lampau dengan masa kini. Sampai dengan moratorium dua tahun yang lalu, sudah ratusan pengusulan pembentukan baru kabupaten dan kota menunggu keputusan. Gejala pemekaran wilayah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang disahkan melalui UU Pemerintahan Daerah No. 22/1999 dan direvisi UU no. 34/2004. Lalu apa hubungan pembentukan DOB dengan kerajaan, yang *nota bene* sudah dihapus dengan telah berdirinya Negara Republik Indonesia (RI) dengan kepala negara seorang presiden dan wakil presiden. Di mana hak politik suatu kerajaan atau kesultanan sesudah Indonesia merdeka. Dari ratusan kerajaan, hanya Yogyakarta sebagai penerus kerajaan Mataram karena peran sejarah khususnya dalam masa revolusi kemerdekaan, diberi hak-hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri dalam bentuk pemerintah daerah istimewa. Pelaksanaan pemerintahan tradisional untuk bekas wilayah kraton Yogyakarta Hadiningrat disesuaikan dengan pemerintahan nasional RI yaitu memposisikan Sultan Yogyakarta sekaligus sebagai Kepala Daerah setara gubernur.

Meskipun kerajaan atau kesultanan di Indonesia telah berakhir sebagai entitas politik, pada hakikatnya masih eksis dalam makna kebudayaan. Artinya bahwa nilai-nilai tradisi kerajaan yang merupakan warisan sejarah masih mempunyai makna bagi kehidupan masyarakat. Para keturunan raja atau sultan semestinya mempunyai kewajiban sekaligus bertanggung jawab atau kelestarian nilai-nilai tradisi keluarga dari keturunan kerajaan tersebut.

PERSPEKTIF KEKINIAN

Sejarah merupakan keniscayaan bagi sesuatu perubahan, namun juga terdapat unsur kesinambungan, khususnya bagi pemaknaan yang dianggap relevan dengan kehidupan masa kini. Hal itu bertalian dengan unsur pokok dalam sejarah yakni interpretasi atas fakta sejarah. Begitulah manakala ditelaah mengenai

²Pemekaran merupakan istilah dalam reorganisasi batas-batas regional Indonesia pasca 1999, atas nama *good governance*, demokratisasi, dan otonomi daerah, Lihat Lorraine V. Aragon dalam Schulte Nordholt dan Klinken 2007:49.

kekinian dan kelampauan Banggai sebagai kerajaan, setelah ratusan tahun eksis kemudian tak lagi berwujud. Adalah ingatan kolektif yang memungkinkan masa lampau dihadirkan kembali apakah untuk sekedar mengenang atau untuk tujuan tertentu. Pemaknaan atas sejarah kerajaan Banggai itulah rupanya yang ingin dimaknai bertalian dengan pemekaran wilayah di bekas daerah kekuasaannya.

Dinamika sejarah lokal di Indonesia menarik dan menantang untuk dikaji sejak reformasi 1998 hingga masa belakangan ini, khususnya bertalian dengan pelaksanaan otonomi daerah. Akan halnya yang terjadi di bekas daerah kekuasaan kerajaan Banggai perubahan administrasi pemerintahan antara 1999 hingga 2013. Kabupaten Banggai boleh disebut sebagai representasi kerajaan Banggai mengalami perubahan dengan "pemekaran" menjadi tiga kabupaten yakni Kabupaten Banggai (induk), Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. Ingatan kepada masa lampau Kerajaan Banggai sebagai suatu kesatuan sosio-politik yang besar di bagian timur Sulawesi, boleh menjadi petunjuk bahwa masa lampau masih ada dan ingin dimaknai.

Ingatan seorang aktivis muda bernama Hasdin Mondiga akan masa lampau Banggai dituangkan dalam bukunya yang berjudul "Banggai Darussalam: Fajar Baru di Laut Banda." Hasdin Mondiga melihat bahwa fluktuasi nama Ping-Yai (Abd ke-11), Benggawi (abd ke-14), Tano Bolukan (abad ke-15), dan Kabupaten Banggai Kepulauan (kini) yang hadir dalam bingkai Indonesia dengan menyisakan "berbagai kemerosotan, penghinaan, penghisapan, dan penindasan."³ Dalam kategori historiografi, karya semacam ini digolongkan sebagai sejarah publik. Penulisan sejarah seperti ini dimaksudkan lebih untuk tujuan publik atau masyarakat dalam makna ideologis atau praktis. Sejarah dalam pengertian bukan ditekankan pada "apa yang sesungguhnya terjadi" tetapi "sejarah sebagaimana diinginkan". Penulisnya tidak berdasarkan kaidah sejarah sebagai ilmu yang mempunyai metode atau metodologi dan kerangka konseptual bersifat teoretik. Contoh kecil dari karya Mondiga misalnya dalam penyebutan Laut Banda adalah keliru karena seharusnya Laut Maluku. Tampak bahwa apa yang "diinginkan" oleh penulis adalah pada istilah "darussalam" yang tidak ada pada nama kerajaan Banggai dahulu dan "fajar baru" merupakan konsep bentukan masa kini. Dengan konsep "fajar baru" itu barangkali dimaksudkan sebagai "harapan baru" untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Hal penting dari sejarah publik adalah berguna untuk memahami apa dan bagaimana masyarakat mengapresiasi sejarahnya, berupa aspirasi, cita-cita dsb.

Secara demografis, Banggai pada tahun 1920 memiliki penduduk sejumlah 76.633 jiwa sepuluh tahun kemudian yakni tahun 1930 penduduk Banggai itu berjumlah 95.515 jiwa. Keadaan itu berubah lagi pada tahun 1961 bahwa penduduk Banggai 144.879 jiwa.⁴ Jadi, transformasi penduduk Banggai selama kurang lebih 40 tahun mengalami peningkatan dari 76 ribu jiwa menjadi 144 ribu hampir separuh. Keadaan itu menunjukkan bahwa tingkat mobilitas penduduk Banggai sangat tinggi dan perubahan itu harus diselingi oleh kebijakan yang pro pada mobilitas yang tinggi, dengan demikian sejarah lokal mengajarkan bahwa dinamika lokal yang dinamis harus mendapat perhatian yang serius terutama penulisan sejarah berdasar analisis historis yang maksimal dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵

³ Hasdin Mondiga, *Banggai Darussalam: Fajar Baru di Laut Banda* (Jakarta: LP2M, 2007), hal. 61.

⁴ Masri Singarimbun dkk, *Sensus Penduduk 1961 Penduduk Desa Sulawesi dan Maluku* (Yogyakarta: PPSK UGM dan BPS, 1980), hal. 229; Volkstelling 1920 dan Volkstelling 1930.

⁵ Sebagai perbandingan perkembangan penduduk itu kelihatan meningkat terus karena tahun 1971 sebanyak 181.698, 1980 sebanyak 268.203, dan pada tahun 1990 sebanyak 347.335 jiwa.

Sesungguhnya sudah sejak masa kolonial Belanda kemudian masa pendudukan Jepang telah terjadi pembagian atau pemecahan daerah kesatuan wilayah kerajaan Banggai. Demikian pula pada masa Indonesia merdeka hingga tahun 2000-an. Namun pasca pemerintah Orde Baru gejala pemekaran diberi kerangka sebagai penerapan desentralisasi yang memberi kewenangan lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan administrasi pemerintah. Lebih daripada itu seperti terjadi pada banyak Negara berkembang telah menggunakan desentralisasi sebagai alat untuk memperbaiki pemerintahan yang efektif, responsive, dan akuntabel. Di beberapa Negara penerapan desentralisasi sebagai cara penting untuk mencegah disintegrasi bangsa-negara di tengah tajamnya krisis politik. Banyak pengamat memperkirakan gejala yang terjadi di Yugoslavia terjadi pula di Indonesia. Setelah Timor Timur sebagai provinsi ke-27 memilih merdeka lepas dari Indonesia, maka daerah-daerah lain menyusul menuntut merdeka (Mietzner dalam Hill, 214:45).

Dalam konteks itu muncul ide membentuk "Propinsi Banggai Darussalam."⁶ Pemekaran dari Kabupaten Poso menjadi tiga kabupaten di Wilayah Banggai merupakan upaya masyarakat untuk menuju cita-cita itu, namun pertanyaannya adalah bagaimana nilai sejarah/budaya (Kerajaan Banggai) menjadi faktor pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui pemekaran wilayah dan apa implikasinya terhadap aspek sosial-ekonomi (makro) dan budaya/tradisi maritim di Indonesia Timur?

Fenomena pemekaran seperti itu termasuk dalam kajian subnasional atau kajian sejarah dinamika sejarah sosial-politik lokal menarik. Keadaan ini karena proses sosio-politik subnasional membawa implikasi pada dampak diametral. Hal itu tampak dengan munculnya kepentingan pusat dan daerah. Karakteristik lokal dengan keanekaragaman masyarakat berimplikasi pada dua hal, menuju pada kebaikan bersama mengakomodasi kepentingan masyarakat dan sebaliknya dapat menimbulkan sikap intoleransi. Kebaikan bersama akan tampak pada agenda pelayanan pemerintahan yang lebih cepat, penyediaan infrastruktur yang lebih luas, pelayanan kesehatan yang lebih memuaskan. Selain itu, proses perubahan yang dapat dilihat adalah rakyat dibenarkan untuk memilih kepala daerah langsung dan sekaligus mensyaratkan masyarakat lokal memilih pemimpin sendiri dan juga terjadinya pembagian keuangan pusat dan daerah yang lebih adil.⁷

Kecemerlangan lokal Kerajaan Banggai yang masih berpengaruh bagi pemekaran tiga Kabupaten dari Kabupaten Poso akan berusaha digambarkan dalam perkembangan sejarah maritim di Indonesia Timur untuk menyambut ide membangun Indonesia dari pinggir. Tulisan ini akan berusaha menjelaskan beberapa hal, yakni: *Pertama*, latar belakang Kerajaan Banggai sebagai kerajaan yang bergabung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, proses pemekaran tiga Kabupaten Banggai di bahagian Sulawesi Timur. *Ketiga*, Implikasi kehidupan sosial-ekonomi dan budaya maritim masyarakat Banggai di Indonesia Timur. *Keempat*, penutup.

⁶Ide ini, sekarang sedang diperjuangkan menjadi DOB baru yakni Provinsi Sulawesi Timur yang berkedudukan di Luwuk Banggai.

⁷Haliadi, "Reformasi di Tingkat Lokal Sulawesi Tengah (Kasus Banggai dan Parigi Moutong)", Kertas Kerja yang belum diterbitkan, 2016, hal. 1.

KERAJAAN BANGGAI

Pembentukan kerajaan lokal Sulawesi Tengah berdasarkan sumber silsillah kerajaan kerajaan-kerajaan lokal⁸ dan arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC)⁹ dibagi kepada dua tahap pendirian kerajaan, yaitu: kerajaan yang didirikan di antara abad ke-15 hingga abad ke-16 dan kerajaan yang didirikan diantara abad ke-17 sehingga abad ke-19. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-15 hingga abad ke-16 antara lain Kerajaan Buol, Banawa, Parigi, Tavaeli, Banggai, dan Mori, sementara kerajaan lokal Sulawesi Tengah yang berdiri pada abad ke-17 hingga abad ke-18 ialah Kerajaan Bungku, Tojo, Tatanga, Moutong, dan Tolitoli.¹⁰ Kerajaan Banggai didirikan oleh Maulana Prins Mandapar tahun 1571 yang memerintah di Kerajaan Banggai sejak tahun 1571 hingga tahun 1601. Terdapat dua puluh satu orang yang pernah bertakhta di Kerajaan Banggai.¹¹ Raja di Kerajaan Banggai dikenal dengan sebutan *Adi*,¹² *Tomundo* atau juga biasa disebut *Tuutu*. Raja terakhir di Kerajaan Banggai ialah Sukuran Amir yang berkuasa sejak tahun 1941 sehingga tahun 1957,¹³ raja terakhir ini adalah paman dari Raja yang sesungguhnya berkuasa tetapi karena masih kecil sehingga dipangku sementara oleh pamannya. Tahta yang dipegang oleh paman hingga kini tidak pernah dikembalikan kepada anak dari Raja terakhir Kerajaan Banggai yang bernama Raja Awaluddin sehingga keadaan ini juga yang menjadi konflik tersembunyi dalam pemangku kepentingan Kerajaan Banggai.

Perkembangan Kerajaan Banggai sejak abad ke-15 hingga akhir abad ke-20 masih memegang teguh struktur kerajaan terutama keturunan pemangkunya. Kebiasaan Struktur Kerajaan sebagai manifestasi struktur pemikiran masyarakat Banggai berupa: *Basalo Sangkap* (Kokini, Singgolok, Babolau, dan Katapean) wilayah teritorialnya jelas; *Tomundo/Mian Tuu*; *KALLE*. Kemudian, *KOMISI AMPAT* (Djogugu, Hukum Tua, Mayor Ngofa, dan Kapiian Laut); *MIAN TUU* (Basaan, Liang, Palabatu, dan Lipuadino); *IMAM BAGINSA* (Kepala Imam); *GIMALAHA*; *BABASAL* (wilayah Adat); *BASALO* (Tanangkung, Bulagi, Totikum, Labobo/Mansalcan, Buko, Liang, dan Banggai), *BOSANO* (Balantak, Lamala, dan Masama), dan

⁸ Stamboen atau Silsillah Kerajaan Bungku yang dibuat oleh G.L. Reinderhoff disalin kembali oleh Komendangi, Stamboen atau Silsillah Kerajaan Sojol yang dibuat oleh Singalam, Stamboen atau Salasilah Kerajaan Tavaeli, dan Stamboen atau Salasilah Kerajaan Palu.

⁹ *Dagregisters en Registers (inhoudsopgave) op dagregisters, Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Ternate 1680, Dagregister, brieven, actens, ordres, instructien en andere voorvallende stukken meergehouden, gesonden en ontfangen, verleendt gegeven en voorgevallen op der reijse van d'Ed. heer gouverneur Robbertus Padbrugge met het schip 't Wapen van Middelburgh, van Ternate over Macquan, Zangij, Chiau, Manado, Bwool, Tontolij, Goronta, Xula, Bahgij etcetera beginnende 21 October 1680 en eindigt 11 Ogos 1681*, hlm. 13.

¹⁰ Mattulada, *Sejarah Tamadun To Kaili (Orang Kaili)*, Palu: Badan Penerbit Universitas Tadulako, tanpa tahun terbit; Kotilainen, Eija-Maija, 1992, *When The Bones are Left: A Study of the Material Culture of Central Sulawesi*, Helsinki: The Finnish Anthropological Society.

¹¹ Maulana Prins Mandapar (1571-1601), Mumbu Doi Kintom (1602-1630), Mumbu Doi Benteng (1630-1650), Mumbu Doi Balantak Mulang (1650-1689), Mumbu Doi Bandar (1690-1705), Mumbu Doi Bacan Abu Kasim (1705-1749), Mumbu Doi Mendono (1749-1753), Mumbu Doi Padangko (1754-1763), Mumbu Doi Dinadat Raja Mandaria (1763-1808), Mumbu Doi Galela Raja Atondeng (1808-1815), Mumbu Tenebak Raja Laota (1815-1831), Mumbu Doi Pawu Raja Taja (1831-1847), Mumbu Doi Bugis Raja Agama (1847-1852), Mumbu Doi Jere Raja Tatu Tonga (1852-1858), Raja Soak (1858-1870), Raja Nuridin (1872-1880), Raja H. Abdulazis (1880-1900), Raja H. Abdurrahman (1901-1922), Raja Awaluddin (1925-1940), Raja Nuridin Daud, dan Raja HAS. Amir (1941-1957).

¹² Dormier, J.J., 1945, *Hukum Adat Banggai* (terjemahan), Disertasi Doktor di Fakultas Undang-Undang Rijk-Universiteit, hlm.29-31; rujuk juga: Kruyt, Alb. C., 1931, *de vorsten van banggai*, *Koloniaal Tijdschrift (KT)* 20, hlm. 505-529 dan 605-624.

¹³ Broch, Harald Beyer. 2000, "Yellow Crocodiles and Bush Spirits: Timpaus Islanders' Conceptualization of Ethereal," *ETHOS*, Vol. 28, No. 1 (Mac., 2000), hlm. 3-19.

BOSANYO (Luwuk, Kintom, Batui, Bunta, Pagimana). Semua wilayah yang disebutkan ini merupakan wilayah yang masih terjait dengan adat istiadat Kerajaan Banggai terutama keluarga yang masih terkait dengan pemangku kerajaan di masa lalu.

Pada tahun 1948 terjadi pertemuan raja-raja di Parigi untuk membicarakan pengalihan atau penggabungan semua wilayah Kerajaan di Sulawesi Tengah termasuk Kerajaan Banggai. Pertemuan raja-raja berlangsung pada tanggal 27 sampai tanggal 30 Nopember 1948 yang biasa dikenal dengan nama "Muktamar Raja-Raja Se-Sulawesi Tengah." Pada pertemuan itu dihadiri oleh: Raja Poso (W.L.Talasa), Raja Tojo (Muslaini), Raja Una-Una (Lasahido), Raja Bungku (Abd. Rabbie), Raja Tavaeli (Lamakampali), Raja Moutong (Tombolotutu), Raja Parigi (Tagunu), Raja Mori (Rumampuo), Raja Sigi-Dolo (Lamakarate), Raja Banggai (H.S.A. Amir), Raja Palu (Tjatjo Ijazah), Raja Lore (S. Kabo), Raja Banawa (L.Lamarauna), Raja Kulawi (W. Djiloi), dan *Vorzitter Zelfbestuurscommissie* Tolitoli (R.M.Pusadan). Pertemuan itu menghasilkan: Penetapan Undang-Undang Dasar Sulawesi Tengah yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1948, kemudian disahkan oleh Residen Manado pada tanggal 25 Januari 1949 nomor R.21/1/4. Mereka sepakat untuk keluar dari Negara Indonesia Timur (NIT) dan tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keputusan itu antara lain: Pertama, bentuk pemerintahan yang ada di Sulawesi Tengah diarahkan pada corak otonom (setingkat daerah tingkat II), Kedua mengangkat R.M. Pusadan sebagai Kepala daerah Sulawesi Tengah yang pertama. Pada tahun ini, Kerajaan Banggai menjadi salah satu bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dijalankan oleh tokoh H.A.S. Amir sekaligus penentu pemindahan Banggai ke Luwuk.

Latar belakang tokoh H.A.S. Amir sebagai "pemangku" Raja Banggai terakhir berfungsi sebagai elite aristokrasi yang membantu birokrasi Kolonial Belanda di Banggai. Beliau dilantik pada tahun 1916 oleh Kolonial Belanda sebagai birokrat kolonial dan bertugas sebagai *gezaghebber hoofd van plaatslijk Bestuur* Banggai. Pada tahun 1927 Amir dilantik menjadi *Bestuur Assisten* atau Asisten Pemerintahan Pribumi masa Kolonial Belanda di Tataba Banggai. Pada penghujung pemerintahan Belanda tahun 1940-1941 beliau dilantik menjadi pegawai daerah di Tangkian Bunta dan Kepala Daerah Bawahan di Lambangan.¹⁴ Pada waktu yang sama juga yakni pada 1 September 1940 beliau menjadi Ketua Hadat di Lambangan merangkap pegawai daerah bawahan di Bualemo. Pada 1 Maret 1941, dilantik menjadi Raja Banggai menggantikan Raja Nurdin Daud yang masih kecil sekaligus menjadi Pemerintahan Pribumi (*Bestuur Assisten*). Seterusnya dalam pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) bentukan Belanda beliau juga berperanan di dalamnya. Pada 8 Juni 1949, dilantik menjadi Anggota Senat Negara Indonesia Timur

¹⁴ H. S. A. Amir dilahirkan pada 15 Juli 1902 di Banggai dan meninggal dunia pada 1986. Pada bulan Januari 1916, bertugas di pejabat *Gezaaghebber hoofd van Plaatslijk Bestuur* Banggai. Pada tahun 1922 menunaikan ibadah haji bersama Abdur Rahman Raja ke-18 Banggai. Pada tahun 1926 dilantik menjadi Hatibi Banginsa sebagai langkah awal menjadi Mayor Ngofa dan ke *Tomundo* atau *Tuutu* (Raja). Pada 1927 menjabat sebagai *Bestuur Assisten* di Tataba, kemudian menjadi Pengacara Muda di Luwuk pada tahun 1929 dilantik menjadi *Major Ngofa lid van het Zelfbestuur* merangkap Ketua daerah Tangkian di Bunta. Pada 1 September 1940 menjadi Ketua Hadat-hadat hoofd di Lambangan merangkap Ketua Daerah Bawahan di Lambangan dan Bualemo. Pada 1 Maret 1941, dilantik menjadi Raja Banggai menggantikan Raja Nurdin Daud yang masih kecil. Pada 8 Juni 1949, dilantik menjadi Anggota Senat Negara Indonesia Timur (NIT) di Makassar. Pada 19 Desember 1950 menggantikan Asisten Residen *Onderafdeling Hoofd van Plaatslijk Bestuur* di Luwuk. 1 November 1953 – 31 Mei 1959 menjadi Wedana di KPN Luwuk, Ahli Praja – Patih KPN Luwuk. Pada 10 November 1960 hingga tahun 1982: 1960 menjadi anggota MPRS wakil Sulawesi Tengah, 1977 menjadi anggota MPR RI wakil daerah Sulawesi Tengah, 1982 juga dipilih menjadi anggota MPRS RI wakil Sulteng. Lihat: Riwayat Hidup HAS Amir, Arsip Propinsi Sulawesi di Makassar, nomor Registrasi 3.

(NIT) di Makassar.¹⁵ Tokoh H.A.S. Amir menjadi penentu arah gerak maju Kerajaan Banggai di masa Orde Lama bahkan di masa Orde Baru hingga masa Reformasi di tingkat lokal Banggai.

PEMERARAN TIGA KABUPATEN DI SULAWESI TENGAH

Latar belakang sejarah pemekaran wilayah Kerajaan Banggai telah dilakukan sejak masa Kolonial Belanda dan Masa Orde Lama dan Orde Baru serta reformasi di Indonesia. Transformasi pemekaran pada masa kolonial di wilayah Banggai antara lain Pertama, Pada awal abad ke-20 (baca: tahun 1908) Hindia Belanda membagi daerah di Indonesia menjadi dua bagian utama yakni daerah yang dikontrol langsung (*Rechtsreeksbestuursgebied* atau *Gouvernementslanden*) dan daerah yang tidak langsung dikontrol (*Zelfbestuurslandschappen* atau *Vorstelanden*). Daerah yang dikontrol langsung dibagi lagi menjadi *afdeelingen* dan sub bagiannya *onder afdeelingen*. Daerah Sulawesi Tengah termasuk Banggai Kepulauan masuk dalam wilayah Gubernur Makassar yang terdiri atas *Afdeling Oost Celebes* dan *Afdeling of Midden Celebes*, meliputi *onder afdeling-onder afdeling*. Pada waktu ini, *onder afdeling* Kolonodale dan *onder afdeling (oa.)* Banggai masuk dalam wilayah *Afdeling Oost Celebes* dengan ibukota di Bau-Bau di Pulau Buton.

Kedua, pada tahun 1919 wilayah Sulawesi Tengah dibagi dua *afdeling* yakni *afdeling* Donggala: *oa.* Donggala, Tolitoli, dan Palu; *afdeling* Poso terdiri atas: *oa.* Poso, *oa.* Parigi, *oa.* Kolonodale, dan *oa.* Banggai di Banggai. Ketiga, 1926 *lanschaap* Banggai dibagi menjadi *oa.* Banggai Darat di Luwuk dan *oa.* Banggai Laut di Banggai yang masuk dalam Keresidenan Manado. Keresidenan Manado di Sulawesi Tengah terdiri atas *oa.* Donggala (Banawa, Tawaeli), Palu (Palu, Sigi Biromaru, Dolo, dan Kulawi), Poso (Tojo Una-Una, Poso, Lore), Parigi (Parigi, Moutong), Kolonodale (Mori, Bungku), Banggai (Banggai Darat di Luwuk, Banggai Laut di Banggai), Tolitoli, dan Buol. Inilah sumber inspirasi dari pembagian wilayah pemekaran Banggai Kepulauan di tahun 1999. Keempat, 1938 Sulawesi Tengah terdiri atas *oa.* Donggala (Banawa, Tawaeli), Palu (Palu, Sigi Biromaru, Dolo, Kulawi), Poso (Tojo, Poso, Lore, Una-Una), Parigi (Parigi, Moutong), Luwuk (Kerajaan Banggai Laut di Banggai dan Banggai Darat di Luwuk), dan Tolitoli (Kerajaan Tolitoli). Kelima, 1942 pada pendudukan Jepang antara tahun 1942-1945, distrik diganti menjadi *gun*, kepala distrik menjadi *gunco*, Raja menjadi *Shuco* dan satu hal yang perlu mendapat catatan adalah ibukota Banggai dipindahkan ke Luwuk. Hal ini dilakukan oleh H.S.A. Amir karena mendapatkan legitimasi politik dari pendudukan Jepang di Luwuk. Legitimasi ini dapat dilihat dari nama anaknya yang bernama Hideo sebagai pemberian nama oleh Jepang yang berkuasa di Luwuk.¹⁶

Kemudian, pemekaran wilayah Banggai dilakukan pada masa Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi dimulai berdasarkan UU No. 29 tahun 1959 dan SK Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara Tengah tanggal 4 Februari 1961 no. 01/Pem/1961, wilayah Banggai dibagi dalam: Kewedanan Banggai Darat dan Banggai Kepulauan. Banggai Darat terdiri atas: Kecamatan Luwuk (distrik Luwuk, Batui, Kintom, Bonebabakal, dan Balantak), Kecamatan Teluk Tomini (Bunta, Pagimana). Wilayah Banggai Kepulauan dibagi dalam: Kecamatan Banggai (distrik Banggai, Labobo Bangkurung, dan Totikum), Kecamatan Tinangkung (Distrik Salakan, Buko-Tataba, Bulagi, dan Liang). Ibukota berada di Luwuk.¹⁷ Kedelapan, Undang-Undang no.18 tahun 1965 dan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tingkat I Sulawesi Tengah tanggal 15 Januari 1964 no. 25/1964 Kabupaten Banggai meliputi wilayah: Kecamatan Labobo Bangkurung ibukota di Mansalean, Kecamatan Banggai di Banggai, Totikum di Sambiu, Tinangkung di

¹⁵Sementara tokoh yang sama juga seperti H. M. Djaruddin Abdullah pula menjadi juru tulis di Pejabat Landschaap Sigi Biromaru dan Sigi Dolo. Kemudian beliau menjadi penarik pajak di Palu serta menjadi Juru Tulis di Pejabat Landschaap Sigi Dolo antara tahun 1930-1946. Arsip Pribadi Jaruddin Abdullah, Milik Intje Mawar Lasasi, di Palu, belum dipublikasikan.

¹⁶Wawancara Hideo Amir, Hari Minggu, tanggal 23 Juli 2017, di Luwuk Kabupaten Banggai.

¹⁷Machmud, HK. *Babad Banggai Sepintas Kilas* (Jakarta/Banggai: tanpa penerbit: 1986).

Salakan, Bulagi di Bulagi, Liang di Liang, Buko-Tataba di Buko, Batui di Batui, Bunta di Bunta, Kintom di Kintom, Pagimana di Pagimana, Luwuk di Luwuk, Lamala di Bonebabakal, dan Balantak di Balantak. Sistem ini masih mengikuti pembagian pada zaman kerajaan Banggai dulu yakni tujuh wilayah Banggai Laut dan tujuh wilayah Banggai Darat.

Masyarakat Banggai baik di darat maupun di laut mengenal dua Kota besar Banggai yakni Kota Banggai dan Kota Luwuk. Kedua kota inilah yang representatif menjadi Kota di wilayah dua Banggai. Ibukota Kabupaten Banggai di Luwuk. Sejak tahun 1964 Badan Penuntut Daerah Otonom masyarakat Banggai Kepulauan termasuk Dewan Hadat telah memperjuangkan pemekaran Banggai untuk membentuk Kabupaten Banggai Kepulauan hingga tahun 1999, setelah pemekaran tercapai dengan munculnya UU no. 51 tahun 1999 (pasal 11) ibukota harus dipindahkan dari Kota Banggai ke Kota Salakan. Perpindahan ibukota secara sosio-kultural merubah secara revolusioner (bukan secara evolusi) terutama kejadian 28 Februari 2007 dengan empat orang korban masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Negara ini tidak dapat mengelola konflik komunal akibat kekerasan kolektif. Kasus Banggai Kepulauan pada tahun bulan 27 Februari 2007 adalah bukti bahwa Negara tidak bias menata secara baik kasus-kasus konflik komunal di daerah. Awal mula konflik di Banggai Kepulauan¹⁸ diawali oleh munculnya pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 sebagai regulasi pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, pada pasal 11 dinyatakan bahwa "selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten Banggai Kepulauan, kedudukan ibukota di Banggai dipindahkan ke Salakan." Munculnya pasal 11 tersebut menurut "tokoh-tokoh Kota Banggai dianggap sebagai "pasal siluman" yang sengaja dibuat oleh penguasa Banggai yang bukan orang kelahiran Kota Banggai pada waktu itu yang kebetulan mereka memiliki akses ke DPR pusat padahal semua dokumen pengajuan pemekaran tidak ada satu lembarpun yang mendukung pasal tersebut tapi tiba-tiba muncul pasal 11 sebagai pemicu munculnya konflik. Tokoh yang memunculkan pasal tersebut disebutkan dalam catatan kesaksian Iwan Zaman yang langsung menyebutkan nama-nama tokoh kelompok kecil yakni "Trio Malingong bersaudara" seumpama: Irianto Malingong, Suleman Malingong, Israfil Malingong, Harman Pandipa, Darman Pandipa, Zainuddin Soti, Hasmoro Lampajoa, Abdi Sahido, dan beberapa lainnya di antara mereka, sekarang (baca 2007) ini menjadi elite politik lokal di Bangkep mereka menjadi penguasa di lembaga Eksekutif dan Legislatif sebagai BUPATI, Wakil Ketua DPRD, Ketua Badan Kehormatan DPRD dan Ketua Fraksi Gabungan di DPRD Bangkep.¹⁹ Kejadian ini sesungguhnya mengulang lagi atau mengorek kesalahan lama pemindahan Ibu Kota Banggai yang dilakukan oleh Belanda sejak tahun 1908 hingga 1938 yang membagi Kerajaan Banggai menjadi dua yakni Banggai Darat dan Banggai Laut dengan mengecilkan status Banggai sebagai Ibukota. Juga pada masa Jepang, ibukota Banggai dipindahkan secara sewenang-wenang ke Luwuk dari Banggai. Kemudian, selanjutnya pada tahun 1960-an Kabupaten Banggai terbentuk dengan Ibukota di Luwuk dan tetap merendahkan posisi Banggai sebagai bekas Ibu Kota Kerajaan Banggai beserta hak-hak adatnya.²⁰ Setelah benar-benar otonomi tercipta dan Banggai Kepulauan terbentuk

¹⁸ Konflik di wilayah Banggai sesungguhnya bias diperhatikan sejak Perjuangan Laginda melawan Belanda, baca: Juraid dkk., Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah (Laporan Penelitian Bapeda Prop. Sulteng 1991); Jar'an Abd. Fatah, Kumpulan Cerita Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Asal Mula Danau Tendetung; Cerita Rakyat Desa Kanali, tanpa tempat, penerbit, dan tahun terbit; Banggai Kepulauan Dalam Cerita (Yogyakarta: Rosyada Media, 2000); Ria Mardin, "Misteri Hilangnya Sang Pahlawan di Tanjung Pemali," dalam: Banggai Kepulauan Dalam Cerita (Yogyakarta: Rosyada Media, 2000); Pahlawan Rambe, Sejarah Pendidikan di Banggai Kepulauan (1942-1999), Skripsi S1 FKIP UNTAD 2003. Reinhard Nainggolan, "Demokrasi pada Kearifan Lokal," Kompas, Senin 7 Mei 2007; Wilman Darsono, Mengais Rejeki di Ayunan Ombak (Skripsi S1 FKIP Untad 2006).

¹⁹ Irwan Zaman (Iwan), Kesaksian Atas Nama "Menjalankan" Undang-Undang Terjadi kekacauan dan Disharmonisasi Dalam Kehidupan Sesama Warga Masyarakat/Komunitas Masyarakat Adat Banggai, tidak diterbitkan.

²⁰ Haliadi, Sejarah Lokal Banggai: Sebuah Ide Penguatan Metodologi, Disampaikan pada Seminar Lokal Banggai oleh

sebagai Kabupaten otonom di era reformasi, ibukotanyapun dialihkan dari Banggai ke Salakan.²¹ Hal inilah yang dimaksudkan oleh Hasdin Mondika sebagai "pilunya tangisan jiwa-jiwa lemah yang hak-haknya dirampas," maksudnya Negara telah merampas hak-hak masyarakat beserta adat istiadat maupun kebanggaan sejarah Kerajaan Banggai.

Pindahannya ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dari Kota Banggai ke Ibu kota baru Salakan berdasarkan kemauan pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 diajukan oleh pemangku kepentingan Adat Banggai kepada Mahkamah Konstitusi namun dimentahkan untuk tidak lagi diproses. Pemangku kepentingan Kerajaan Banggai yang dipimpin oleh Iskandar Zaman berusaha untuk memperjuangkan kembali pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan dengan membentuk Kabupaten Banggai Laut. Perjuangan pemekaran yang dinakhodai oleh keturunan Raja Banggai yang bernama Iskandar Zaman pada akhirnya berhasil dibentuk dengan nama Kabupaten Banggai Laut yang beribukota di Banggai berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2013.²² Tokoh Iskandar Zaman merupakan seorang tokoh keturunan Raja Awaludin raja Banggai ke-20 dan juga seorang pengusaha yang meninggal sebelum menyaksikan terbentuknya Kabupaten Banggai Laut yang diperjuangkannya.

KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN BUDAYA MARITIM BANGGAI

Sumber penting yang otentik dan valid untuk melihat konflik dan kekerasan kolektif di tingkat lokal adalah historiografi lokal yang terbit pada zaman di mana konflik itu terjadi. Historiografi Banggai²³ (baca: Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan) yang menarik terbit di Jakarta medio 2008 adalah buku yang berjudul "Banggai Darussalam Solusi di Tengah Krisis,"²⁴ dikarang oleh seorang tokoh pemuda Banggai di Jakarta. Buku ini adalah teriakan dari seorang anak muda Hasdin Mondika yang tercermin dalam pengantarnya yang menyatakan bahwa: "Buku ini ditulis dalam kondisi keprihatinan. Dalam atmosfir udara yang teramat 'kotor dan tercemari'. Dimana ikhlasnya hati, khusuknya doa dan indahnya senyuman telah ternodai dengan panasnya sumpah serapah, darah, kemurkaan dan kutukan sampai pada pilunya tangisan jiwa-jiwa lemah yang hak-haknya dirampas." Menariknya buku ini adalah edisi revisi dari buku sejarah Banggai yang berjudul: "Banggai Darussalam: Fajar Baru di Laut Banda,"²⁵ yang diterbitkan pada tahun 2007 setahun sebelum buku Banggai Darussalam. Mondika melihat perkembangan Orang Banggai termasuk peradaban Banggai yang kelihatan dalam sebuah judul sub bab yang berbunyi "Terjajah Setelah Meng-Indonesia" maksudnya setelah Banggai masuk ke Indonesia (baca NKRI) terjajah dan terjajah lagi. Hal inilah yang menjadi akar konflik di Kabupaten Banggai maupun Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), terutama kasus pemindahan Ibu Kota dari Banggai ke Salakan pada media awal tahun 2007 di Bangkep.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Don Mery Banggai Kepulauan tanggal 1 Desember 2007.

²¹ Haliadi, Masyarakat Baru Dengan Kearifan Lama," Tafsir Sosiobudaya atas UU no.51 pasal 11 pemindahan Ibukota Bangkep dari Banggai ke Salakan disampaikan pada Mahkamah Konstitusi.

²² Wawancara Syarif Uda'a, Hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 di Banggai Kabupaten Banggai Laut.

²³ Machmud HK., Babad Banggai Sepintas Kilat (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1986); baca juga: JJ. Dormier, Hukum Adat banggai VI (Tanpa tempat dan penerbit, 1945); juga orang Banggai menyebar di wilayah Banggai, Liang, Bangkurung, Bulagi, Tinangkung, Buko, dan Totikum, sementara wilayah Banggai Darat tersebar di Balantak, Lamala, Bunta, pagimana, Batui, Kintom, Luwuk dalam: Masyhuddin Masyhuda, Etnik dan Logat di Sulawesi Tengah (Palu: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah, 1991).

²⁴ Hasdin Mondika, *Banggai Darussalam Solusi di Tengah Krisis* (Jakarta: LP2M, 2008), hal. Vii.

²⁵ Hasdin Mondika, *Banggai Darussalam: Fajar Baru di Laut Banda* (Jakarta: LP2M, 2007).

Implikasi negatif dari pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Banggai Laut adalah nelayan yang mencari ikan di wilayah laut kedua kabupaten mulai ada pembatasan-pembatasan yang tidak pernah terjadi sebelum pemekaran di masa lalu. Menurut keterangan seorang pengusaha ikan di Kampung Bajo Bonggan Salakan dinyatakan bahwa nelayan Bajo yang memancing di wilayah Kabupaten Banggai Laut diusir dari tempat itu. Kebiasaan masyarakat nelayan sebelum pemekaran masih mendapatkan hasil yang dapat mendukung kehidupan atau kesejahteraan mereka karena Rep atau karang yang masih menyediakan ikan banyak terutama di Rep Babakal, Rep sabang, dan Rep Merpati yang didukung oleh kebiasaan berbagi atau mencari ikan secara bersama tanpa ada gangguan karena laut milik bersama, namun ketika terjadi pemekaran maka terjadi pembatasan-pembatasan wilayah yang juga pembatasan itu di bawa ke wilayah laut sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan nelayan lokal Banggai.²⁶

KARAKTERISTIK BANGGAI SEBAGAI “PULAU” DAN “LAUT”

Ada semacam kerinduan masyarakat akan kerajaan Banggai yang “hidup” kembali sebagai identitas dan menjadi orientasi kesadaran terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Banggai terutama Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. Pemekaran Kabupaten Banggai Laut dimekarkan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2013 adalah dampak pemindahan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 yang dianggap oleh Orang Banggai Laut sebagai “pasal siluman”. Pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan adalah wujud dari perjuangan untuk mengembalikan identitas “asli kebanggaan” yang dipindahkan dari Banggai Laut ke Luwuk pada zaman pendudukan Jepang oleh H.S.A. Amir di tahun 1942.

Pemindahan itu dengan alasan akses darat lebih bagus dibandingkan dengan akses laut, padahal Kerajaan Banggai merupakan kerajaan maritim yang diperhitungkan di masa lalu. Kerajaan sebagai pusat kesadaran dan legitimasi masih menjadi acuan, namun pemekaran Banggai Kepulauan sadar atau tidak mengikuti pembagian spasial Kolonial Belanda sejak tahun 1919 yang membagi Banggai menjadi Banggai Darat dan Banggai Laut sebagai salah satu wilayah dari Keresidenan Manado yang sebelumnya menjadi bagian wilayah *Afdeling Oost Celebes* dengan ibukota di Bau-Bau di Pulau Buton.

Proses sosio-politik subnasional di Wilayah Banggai dengan memilih identitas Kerajaan Banggai terasa akan memberikan implikasi pada kebaikan bersama untuk kepentingan masyarakat. Pemekaran tiga Banggai (Kabupaten banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut) dari Kabupaten Poso akan terjadi pembagian kekuasaan secara maksimal, namun tokoh-tokoh politik lokal yang mendapatkan legitimasi Kerajaan Banggai justru menjadikan Banggai sebagai pusat perubahan yang menggecwwakan beberapa pihak. Hal ini menjadi awal pengkhianatan identitas kerajaan Banggai dalam dinamika sosio-politik di daerah ini. Pengajuan *legal standing* dari Dewan Adat Banggai ke Mahkamah Konstitusi mengenai pemindahan kembali ibu Kota Banggai Kepulauan ke Banggai pusat Kerajaan lama Kerajaan Banggai telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena ada penarikan berkas dari Ketua Dewan Adat yang dilakukan oleh Hideo Amir, anak raja H.S.A. Amir sehingga mendapatkan protes dari pihak Banggai yang dimotori oleh Iskandar Zaman seorang keturunan Raja Banggai Awaludin raja Banggai ke-20 yang selalu dikatakan berhak atas Kerajaan Banggai.

²⁶ Wawancara dengan H. Ahmad Sombali, Jum'at, 21 Juli 2017 di Bonggan Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kelompok Iskandar Zaman atas nama Kerajaan Banggai berusaha mau mengembalikan kejayaan Kerajaan Banggai menjadi Kabupaten Banggai Laut, namun sebelum menyaksikan pemekaran di tahun 2013, Iskandar Zaman meninggal dunia karena penyakit tetapi sebelumnya telah dilantik menjadi Tomundo dan bergabung ke Forum Keraton Nusantara, bahkan bertindak sebagai Koordinator Forum untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah beliau meninggal digantikan oleh anaknya yang masih kecil dengan pelaksana adiknya Irwan Zaman, namun kelompok Irwan Zaman tidak dapat berbuat banyak sehingga posisi ke-Tomundo-an (Raja Banggai) masih dikendalikan dari Luwuk oleh Hideo Amir yang tetap menganggap bahwa "mahkota" Banggai di atas kepalanya.

Terjadinya konflik antarelite dan kelompok di Banggai bertalian pembentukan daerah otonom baru menjadi tiga kabupaten, perlu dimaknai sebagai upaya penemuan karakter dan identitas "kebanggaian" yang telah lama dianggap hilang. Berakhirnya pemerintah Orde Baru melalui reformasi 1998 memberi peluang daerah untuk meneguhkan identitasnya, termasuk Banggai. Apakah para elite lebih berorientasi pada kepentingan politik untuk mendapatkan kedudukan dalam birokrasi dan/atau juga dalam hal menggali nilai dan semangat "kebanggaian" dalam rangka memerkuat karakter "kepulauan" dan "kelautan". Jika kedua unsur tersebut saling mengisi maka nilai-nilai "Ke-Banggaian" dapat menjadi modal pembangunan negara maritim Indonesia yang kuat.***

RUJUKAN

- Dagregisters en Registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Ternate 1680, Dagregister, brieven, actens, ordres, instructien en andere voorvallende stücken meergehouden, gesonden en ontfangen, verleendt gegeven en voorgevallen op der reijse van d'Ed. heer gouverneur Robbertus Padtbrugge met het schip 't Wapen van Middelburgh, van Ternate over Macquan, Zangij, Chiau, Manado, Bwool, Tontolij, Goronta, Xula, Bahgij etcetera beginnende 21 October 1680 en eijndigt 11 Ogos 1681, hlm. 13.*
- Aragon, Lorraine V. "Persaingan Elite di Sulawesi Tengah" dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken ed. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Buku Obor, 2007. :49—86.
- Asal Mula Danau Tendetung; Cerita Rakyat Desa Kanali*, tanpa tempat, penerbit, dan tahun terbit.
- Anon. 2000. *Banggai Kepulauan Dalam Cerita*. Yogyakarta: Rosyada Media.
- Broch, Harald Beyer. 2000. Yellow Crocodiles and Bush Spirits: Timpaus Islanders' Conceptualization of Ethereal. *ETHOS* 28(1).
- Collingwood, R.G. 1970. *The Idea of History*. Oxford: Oxford University Press.
- Darsono, Wilman. 2006. "Mengais Rejeki di Ayunan Ombak", Skripsi S1 FKIP Untad tidak diterbitkan.
- Dormier, J.J. 1945. *Hukum Adat Banggai* (terjemahan). Disertasi Doktor di Fakultas Undang-Undang Rijks-Universiteit.
- Haliadi, "Masyarakat Baru Dengan Kearifan Lama," Tafsir Sosiobudaya atas UU No.51 pasal 11 pemindahan Ibukota Bangkep dari Banggai ke Salakan disampaikan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____. 2016. Reformasi di Tingkat Lokal Sulawesi Tengah (Kasus Banggai dan Parigi Moutong), Kertas Kerja yang belum diterbitkan.
- _____. 2007. Sejarah Lokal Banggai: Sebuah Ide Penguatan Metodologi, Disampaikan pada Seminar Lokal Banggai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Don Mery Banggai Kepulauan, 1 Desember.

- Hill, Hal. (ed.). 2014. *Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Irwan Zaman (Iwan), Kesaksian Atas Nama "Menjalankan" Undang-Undang Terjadi kekacauan dan Disharmonisasi Dalam Kehidupan Sesama Warga Masyarakat/Komunitas Masyarakat Adat Banggai, tidak diterbitkan.
- Jar'an Abd. Fatah. t.th. *Kumpulan Cerita Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan*. t.pt.
- Juraid dkk. 1991. Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah, Laporan Penelitian Bapeda Prop. Sulawesi Tengah.
- Kotilainen, Eija-Maija. 1992. *When The Bones are Left; A Study of the Material Culture of Central Sulawesi*, Helsinki: The Finnish Anthropological Society.
- Kruyt, Alb. C. 1931. *de vorsten van banggai*, *Koloniaal Tijdschrift (KT)* 20.
- Le Goff, Jacques. 1922. *History and Memory*. Translated by Steven Rendall and Elizabeth Claman. New York. Columbia University Press, 1992.
- Machmud, HK. 1986. *Babad Banggai Sepintas Kilas*, Jakarta: Tanpa Penerbit.
- _____. 1986. HK. *Babad Banggai Sepintas Kilas*, Jakarta/Banggai: tanpa penerbit.
- Mardin, Ria. 2000. Misteri Hilangnya Sang Pahlawan di Tanjung Pemali. Dlm. *Banggai Kepulauan Dalam Cerita*, Yogyakarta: Rosyada Media.
- Masyhuda, Masyhuddin. 1991. *Etnik dan Logat di Sulawesi Tengah*. Palu: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah.
- Mattulada. t.th. *Sejarah Tamadun To Kaili (Orang Kaili)*. Palu: Badan Penerbit Universitas Tadulako.
- Mondiga, Hasdin. 2007. *Banggai Darussalam: Fajar Baru di Laut Banda*. Jakarta: LP2M.
- _____. 2008. *Banggai Darussalam Solusi di Tengah Krisis*. Jakarta: LP2M.
- Nainggolan, Reinhard "Demokrasi pada Kearifan Lokal," *Kompas*, Senin 7 Mei 2007.
- Rambe, Pahlawan. Sejarah Pendidikan di Banggai Kepulauan (1942-1999), Skripsi S1 FKIP UNTAD 2003.
- Riwayat Hidup HAS Amir, Arsip Propinsi Sulawesi di Makassar, nomor Registrasi 3.
- Singarimbun, Masri dkk. 1980. Sensus Penduduk 1961 Penduduk Desa Sulawesi dan Maluku. Yogyakarta: PPSK UGM dan BPS.
- Stamboen atau Silsillah Kerajaan Bungku yang dibuat oleh G.L. Reinderhoff disalin kembali oleh Komendangi, Stamboen atau Silsillah Kerajaan Sojol yang dibuat oleh Singalam, Stamboen atau Salasilah Kerajaan Tawaeli, dan Stamboen atau Salasilah Kerajaan Banggai.
- Volkstelling 1920 dan Volkstelling 1930.

WAWANCARA

- H. Ahmad Sombali, hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 di Bonggan Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Hideo Amir, Hari Minggu, tanggal 23 Juli 2017, di Luwuk Kabupaten Banggai.
- Syarif Uda'a, Hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, di Banggai Kabupaten Banggai Laut.